

**PENGARUH MOTIVASI PEMERINTAH DAN PENGAWASAN
PEMERINTAH TERHADAP UPAYA MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Padang)**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1)*



Oleh :

SUCI OFTARIA SARI
67629 / 2005

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PENGARUH MOTIVASI PEMERINTAH DAN PENGAWASAN
PEMERINTAH TERHADAP UPAYA MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) STUDI EMPIRIS PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KOTA PADANG

NAMA : SUCI OFTARIA SARI

BP/NIM : 2005/67629

KEAHLIAN : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

FAKULTAS : EKONOMI

Padang, Februari 2011

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Lili Anita, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710302 199802 2 001

Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19720910 199802 2 003

Mengetahui,
Ketua Prodi Akuntansi

Lili Anita, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710302 199802 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Program Studi Akuntansi- Sektor Publik Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Padang

PENGARUH MOTIVASI PEMERINTAH DAN PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG

Nama : SUCI OFTARIA SARI
NIM/BP : 67629/2005
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, 7 Februari 2011

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	: Lili Anita, SE, M.Si, Ak	_____
2.	Sekretaris	: Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak	_____
3.	Anggota	: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	_____
4.	Anggota	: Herlina Helmy, SE, M.E, Ak	_____

ABSTRAK

Suci Oftaria Sari : “Pengaruh Motivasi Pemerintah dan Pengawasan Pemerintah Terhadap Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”

Pembimbing : **I. Lili Anita SE, M.Si, Ak**
 II. Nurzi Sebrina, SE, M.Sc. Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji (1) Pengaruh motivasi pemerintah terhadap upaya meningkatkan pendapatan asli daerah 2) Pengaruh pengawasan pemerintah terhadap upaya meningkatkan pendapatan asli daerah pada satuan kerja perangkat daerah di Kota Padang.

Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dari penelitian ini adalah Pemerintah Daerah yang ada di Kota Padang. Sampel ditentukan berdasarkan metode *total sampling*, sebanyak 42 SKPD. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuesioner kepada responden yang bersangkutan. Teknik analisis data dengan menggunakan regresi berganda dengan uji t.

Hasil penelitian membuktikan bahwa (1) Motivasi pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.(2) Pengawasan pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dalam penelitian ini melihat adanya pengaruh positif antara motivasi pemerintah dengan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah maka sebaiknya hal ini dapat dipertahankan secara berkelanjutan agar tujuan terhadap pencapaian penerimaan daerah dapat lebih ditingkatkan serta dipertahankan untuk tahun berikutnya, serta pengawasan pemerintah dapat dipertahankan untuk kedepannya agar tujuan pencapaian penerimaan daerah secara berkelanjutan dapat lebih ditingkatkan, selanjutnya instansi pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan motivasi dalam bekerja serta pengawasan yang lebih bermamfaat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan penerimaan daerah agar pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan serta dapat terwujud sepenuhnya.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Motivasi Pemerintah dan Pengawasan Pemerintah Terhadap Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Pada SKPD yang ada di Kota Padang)”**.

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan serta arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada **Ibu Lili Anita SE, M.Si. Ak** selaku Pembimbing I yang telah bersedia mengorbankan waktu dan tenaga beliau untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada **Ibu Nurzi Sebrina, SE. M.Sc. Ak** selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Keberhasilan penulis dalam rangka menyusun skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

3. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
4. Kedua orang tua dan segenap keluarga penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
5. Rekan-rekan mahasiswa program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang khususnya angkatan 2005 dan 2006.
6. Kepala dan Staf Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Padang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner penelitian ini.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari keterbatasan ilmu yang penulis miliki, sehingga mungkin terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Terakhir penulis menyampaikan harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Padang, Februari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Pembatasan Masalah	9
D. Perumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Kajian Teori	11
1. Pendapatan Asli Daerah	11
a. Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	11
b. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	14
c. Sumber Pendapatan Asli Daerah	15

2. Motivasi Pemerintah	20
a. Pengertian Motivasi Pemerintah	20
b. Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Pemerintah ...	22
c. Teori-teori Motivasi	26
3. Pengawasan Pemerintah	27
a. Pengertian Pengawasan Pemerintah.....	27
b. Tujuan Pengawasan Pemerintah	29
c. Prinsip Pengawasan.....	30
d. Jenis Pengawasan.....	32
B. Penelitian Terdahulu	33
C. Hubungan Antar Variabel	34
D. Kerangka Konseptual	36
E. Hipotesis Penelitian	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Populasi Dan Sampel	39
C. Jenis Data Dan Sumber Data	41
D. Metode Pengumpulan Data	42
E. Variabel Penelitian	43
F. Pengukuran Variabel	43
G. Instrumen Penelitian	44
H. Uji Validitas Dan Reliabilitas	45
I. Uji Asumsi Klasik.....	48

J. Teknik Analisis Data.....	50
K. Defenisi Operasional	54
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	56
B. Demografi Responden	57
C. Deskripsi Hasil Penelitian	59
D. Hasil Uji Validitas Dan Reabilitas	65
E. Hasil Uji Asumsi Klasik	66
F. Hasil Uji Model	69
G. Pembahasan	73
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Keterbatasan	77
C. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Proporsi Penerimaan	7
2. Daftar Responden	40
3. Daftar Skor Jawaban	44
4. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	45
5. Nilai <i>Corrected Item Total Correlation</i>	46
6. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	48
7. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	56
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	57
9. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan	58
10. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa kerja	58
11. Distribusi Frekuensi Variabel Motivasi	59
12. Distribusi Frekuensi Variabel Pengawasan	61
13. Distribusi Frekuensi Variabel Upaya Meningkatkan PAD	63
14. Nilai <i>Corrected Item Total Correlation</i> Penelitian	66
15. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Penelitian	66
16. Uji Normalitas	67
17. Uji Heterokedastisitas	68
18. Uji Multikolinearitas	69
19. Uji Koefisien Determinasi	69
20. Model Regresi	70
21. Uji F Hitung	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian	82
2. Hasil Analisis Validitas dan Reabilitas Pilot Test.....	87
3. Hasil Analisis Validitas dan Realibilitas Penelitian.....	94
4. Statistik Deskriptif	103
5. Uji Multikolinearitas	103
6. Uji Heterokedastisitas	104
7. Uji Normalitas	105
8. Uji Hipotesis	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 yang hakekatnya untuk memperluas otonomi daerah, sehingga arus desentralisasi dan dekonsentralisasi dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, diharapkan bukan saja UU Nomor 32 Tahun 2004 dapat menciptakan demokrasi ekonomi tetapi juga kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pajak dan retribusi daerah yang tercantum dalam UU Nomor 34 Tahun 2000, khususnya persamaan menggali dan memanfaatkan potensi daerah bagi daerah itu sendiri agar membawa harapan besar bagi daerah untuk membangun daerahnya dengan menggali potensi daerahnya sebagai sumber pendapatan daerah.

Hal yang dimaksud oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 dapat terealisasi bila Pemerintah Daerah mampu mengembangkan dan mendayagunakan potensi daerahnya secara optimal, artinya Pemerintah Daerah dengan segala daya upayanya harus terus menggali dan mengembangkan potensi daerah dengan sungguh-sungguh, sehingga mendukung realisasi PAD tersebut diperlukan kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan peran daerah, dalam penetapan sumber-sumber penerimaan asli daerah.

Penyelenggaraan pemerintah terhadap penerimaan-penerimaan daerah tercakup pada motivasi yang mengarah kepada tujuan serta pengawasan atas kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah

berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Pendapatan asli daerah diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Jika pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan dan berjalan dengan baik maka secara tidak langsung menjadikan daerah tersebut maju serta kesejahteraan masyarakatnya merata dalam segala bidang dikarenakan dapat memperluas dan mengatur perkembangan daerahnya.

Abdul (2001) mendefenisikan PAD sebagai penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendapatan daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah, merupakan suatu pendapatan yang dapat menunjang kehidupan masyarakat daerah, dimana pemerintah daerah harus mengoptimalkan penerimaan daerah.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi serta dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah (Ahmad 2008:52). Maksudnya pemerintah daerah haruslah mengatur pengenaan pajak dan retribusi daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh pusat dan provinsi, dimana dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah yang nyata dan bertanggung jawab, sektor pemerintahan memegang peranan penting karena melalui pemerintah daerah semua kegiatan yang menyangkut pengelolaan keuangan dapat dilakukan. Dengan tingginya kesadaran

masyarakat untuk membangun daerahnya sendiri agar bisa bersaing dengan daerah lain diharapkan akan meningkatkan penerimaan daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang diukur dari pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen terbesar dalam menyumbang terbentuknya PAD pada daerah. Menurut Abdul (2001) beberapa hal yang bisa dilakukan dalam meningkatkan PAD terutama terhadap pajak dan retribusi daerah yaitu 1) Penyederhanaan sistem dan prosedur pajak dan retribusi daerah dengan memberikan pelayanan prima, artinya petugas pajak bersikap ramah kepada masyarakat dalam memberikan layanan. 2) Peningkatan pengawasan terhadap penerimaan pajak baik terhadap wajib pajak maupun petugas pajak. 3) Membenahi peraturan-peraturan daerah terkait dengan berbagai jenis pungutan pajak maupun retribusi.

Menurut Abdul (2001:150) untuk merealisasikan PAD agar dapat ditingkatkan serta terlaksana sebagaimana mestinya terhadap penerimaan yang dikelola oleh pemerintah, maka pengawasan pemerintah terhadap penerimaan daerah lebih ditekankan terutama pada pengumpulan penerimaan. Disamping itu peran motivasi pemerintah dalam membenahi peraturan-peraturan daerah serta tatanan kerja dibutuhkan sekali agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana sebagai mana mestinya.

Menurut Irawan dalam Fitri (2009) terdapat beberapa usaha-usaha dalam meningkatkan PAD. Secara umum, meliputi: 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan daerah dalam bentuk retribusi atau pajak. 2) Eksplorasi sumber daya

alam dan 3) Skema pembentukan kapital atau investasi daerah melalui penggalangan dana atau menarik investor.

Abdul (2001:322) menjelaskan tentang beberapa faktor-faktor yang dapat meningkatkan kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah (potensi penerimaan daerah) yaitu 1) Pelengkapan pendapatan 2) Perbaikan organisasi 3) Penyesuaian tarif 4) Penyempurnaan administrasi 5) Koordinasi pemungutan 6) Pencegahan kebocoran. Upaya peningkatan potensi dan realisasi PAD merupakan konsep dinamis atau berkesinambungan oleh karena itu peran pemerintah daerah selaku sektor publik dituntut untuk dapat mengoptimalkan penerimaan PAD tersebut. Dikarenakan masih tumpang tindihnya pengelolaan penerimaan PAD di Kota Padang terutama pada pajak dan retribusi daerah, seperti masih banyaknya orang yang tidak mengetahui bahwa begitu pentingnya pendapatan dari sektor pajak dan retribusi untuk kepentingan bersama.

Dalam upaya untuk mengoptimalkan penerimaan PAD peran pemerintah daerah merupakan faktor penentu agar hasil-hasil dari penerimaan pajak dan retribusi daerah tercapai. Menurut Mitchell dalam Winardi (2001:1) motivasi merupakan proses mewakili psikologika, yang menyebabkan timbulnya diarahkannya dan terjadinya persistensi kegiatan-kegiatan suka rela (volunter) yang diarahkan pada tujuan tertentu. Setiap pimpinan perlu memahami proses-proses psikologika apabila berkeinginan untuk membina agar suatu tujuan dapat berhasil dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran yang diinginkan oleh organisasi. Dalam suatu organisasi pemerintahan, motivasi mempunyai peranan penting karena

motivasi dapat menyangkut langsung kepada individu agar setiap pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan keinginan yang ingin dicapai bersama.

Sesuai dengan sifat motivasi yaitu merupakan rangsangan bagi motif perbuatan orang, maka harus dapat menciptakan motivasi yang mampu menumbuhkan motif seseorang untuk mau berbuat sesuai dengan kehendak organisasi pemerintahan tersebut. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kerja seseorang dibedakan atas dua yaitu 1) Faktor intrinsik yang berasal dari dalam diri seseorang, 2) Faktor ekstrinsik yang berasal dari luar diri seseorang. Hal ini dapat mempengaruhi motivasi seseorang demi pencapaian tujuan peningkatan PAD.

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pemerintah dan untuk mencapai tujuan penerimaan PAD yang telah direncanakan maka perlu ada pengawasan. Menurut Poerwadarminta dalam kamus Bahasa Indonesia pengawasan merupakan suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak dibawahnya. Pengawasan tidak hanya mencakup pengawasan keuangan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku melainkan juga pengawasan terhadap daya guna dan hasil guna program dari kegiatan pemerintah. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah memiliki suatu tujuan untuk kepentingan bersama, yang mana diperlukan suatu perlakuan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut apalagi menyangkut kepada penerimaan daerah butuh sekali kontrol dan pengawasan dari pemerintah itu sendiri.

Sedangkan dalam seminar Indische Compshiliteitwet (ICW) tanggal 30 Agustus 1970 dalam Abdul (2001:146), telah disepakati bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah suatu pelaksanaan

pekerjaan atau kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama pengawasan adalah untuk memahami apa yang salah demi perbaikan dimasa datang, dan mengarah pada seluruh kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal.

Dalam meningkatkan PAD, motivasi pemerintah serta pengawasan terhadap jalannya penerimaan PAD merupakan suatu hal yang dianggap perlu dan masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, hal ini terbukti dengan masih kurangnya kontrol pemerintah terhadap masyarakatnya atas pentingnya pajak dan retribusi yang merupakan sumber penerimaan daerah yang berpengaruh besar terhadap PAD.

Upaya peningkatan PAD dari pajak dan retribusi tersebut tidak lepas dari pembenahan terhadap pengawasan pengelolaan di instansi terkait. Pembenahan itu dibarengi pula dengan pemberian kesadaran terhadap tugas dan fungsi PNS yang bekerja dalam rangka peningkatan kualitas kerja yang dimotori oleh pimpinan agar termotivasi dalam bekerja dengan sebaik-baiknya.

Hal ini berpengaruh terhadap penerimaan Pemerintah Kota Padang, yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Diantara jenis PAD Kota Padang yang memberikan pengaruh besar yaitu pajak daerah, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasilnya, serta lain-lain PAD yang sah. Proporsi penerimaan pemerintahan Kota Padang lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1
Proporsi Penerimaan

<i>No</i>	<i>Jenis Penerimaan</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>
1.	PAD	85,90%	82,78%	96,16%	93,01%	91,64%
	a. Pajak Daerah	35,02%	37,57%	43,55%	44,36%	40,02%
	b. Retribusi	18,13%	16,55%	21,09%	23,62%	20,19%
	c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasilnya	25,62%	23,80%	25,00%	18,82%	19,80%
	d. Pendapatan lain-lain	7,13%	4,86%	6,52%	6,21%	11,63%
2.	Lain-lain pendapatan yang sah	14,10%	17,22%	3,84%	6,99%	8,36%

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa proporsi penerimaan pemerintah Kota Padang mengalami kenaikan bahkan penurunan, yang dilihat dari jumlah penerimaan dalam bentuk persentase yang merupakan hasil penerimaan yang terealisasi dari jumlah yang telah dianggarkan sebelumnya. Seperti data penerimaan pada tahun 2008 dari jumlah PAD yang terealisasi hanya mencapai 91,64% dari jumlah yang dianggarkan. Dapat dilihat bahwa penerimaan tahun 2008 ini lebih rendah bila dibandingkan dengan jumlah penerimaan yang terealisasi pada tahun 2007 dan 2006 yang lalu.

Dari fenomena tersebut penerimaan daerah mengalami proporsi yang tidak stabil, oleh karena itu pemerintah diminta untuk dapat mengoptimalkan penerimaan daerah pada masa yang akan datang. Dimana pembenahan motivasi dari pemerintah serta diikuti dengan pengawasan yang bagus di Pemerintahan Kota Padang, maka secara tidak langsung dapat memacu masyarakat untuk

melaksanakan kewajibannya dengan baik, agar terciptanya Pendapatan Asli Daerah yang makin tahun makin meningkat sesuai dengan keinginan yang telah direncanakan.

Perlunya pengawasan dari penerimaan daerah tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizka (2007) menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh signifikan positif terhadap upaya meningkatkan penerimaan daerah. Artinya semakin tinggi tingkat pengawasan pemerintah terhadap penerimaan daerah maka upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dapat terealisasi, dimana pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap PAD telah baik, hal ini didukung oleh adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab sehingga penerimaan daerah dapat dioptimalkan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dimas (2009) tentang kemampuan pegawai dan motivasi pegawai dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah. Menunjukkan bahwa motivasi pegawai berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan PAD. Artinya semakin tinggi motivasi pegawai dalam bekerja maka secara langsung mempengaruhi penerimaan daerah.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, untuk mengetahui sejauhmana pengaruh pemerintah agar termotivasi dalam bekerja dan dibarengi dengan control yang baik, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul **“Pengaruh Motivasi Pemerintah dan Pengawasan Pemerintah Terhadap Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintahan Kota Padang”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Apa saja bentuk-bentuk usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Pemerintahan Kota Padang.
2. Apa saja faktor-faktor pendukung untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Pemerintahan Kota Padang.
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah terhadap upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintahan Kota Padang.
4. Se jauhmana pengaruh motivasi pemerintah terhadap upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintahan Kota Padang.
5. Se jauhmana pengaruh pengawasan pemerintah terhadap upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintahan Kota Padang.

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi serta memotivasi agar jalannya tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Pemerintahan Kota Padang. Hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat motivasi serta pengawasan yang dimiliki pemerintah Kota Padang terhadap pengumpulan PAD.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengaruh motivasi pemerintah terhadap upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintahan Kota Padang.
2. Sejauhmana pengaruh pengawasan pemerintah terhadap upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintahan Kota Padang.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh motivasi pemerintah terhadap upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintahan Kota Padang.
2. Pengaruh pengawasan pemerintah terhadap upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintahan Kota Padang.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan motivasi pemerintah dan pengawasan pemerintah terhadap upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2. Bagi Akademik, sebagai khazanah penelitian terutama dibidang sektor publik, dan sebagai referensi untuk diteliti lebih lanjut oleh teman-teman mahasiswa dilingkungan Akademika.
3. Bagi Sektor Publik, dapat dijadikan sebagai masukan untuk mengetahui motivasi pemerintah dan pengawasan pemerintah terhadap upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

BAB II

KAJIAN TEORI, RERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut agar pendapatan daerah tersebut terus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah (Zul dalam Fitri 2009). Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut pada dasarnya ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

1. Intensifikasi

Intensifikasi pendapatan asli daerah adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memeperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti. Dalam upaya intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek personalianya yang pelaksanaannya melalui kegiatan sebagai berikut:

- a) Menyesuaikan atau memperbaiki aspek kelembagaan atau organisasi berikut dengan perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang.

- b) Memperbaiki atau menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional.
- c) Peningkatan pengawasan dan pengendalian.
- d) Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD.
- e) Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak maupun retribusi.

2. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru, namun dalam upaya intensifikasi ini khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan yaitu pungutan pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan asli daerah berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan bagi masyarakat.

Erri dalam Yani (2009) menyatakan hal yang sama yaitu yang berkaitan dengan meningkatkan pendapatan khususnya PAD, maka kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh adalah dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan sehingga diharapkan PAD akan lebih berperan dan dapat dioptimalkan penerimaannya.

Untuk mengoptimalkan penerimaan PAD langkah-langkah yang harus dilakukan adalah menghitung potensi PAD secara sistematis. Hal tersebut

penting untuk menentukan target PAD sekaligus sebagai alat penilaian kinerja dari pemerintahan itu sendiri. Maka peran pemerintah sangat penting dalam mengevaluasi target PAD yang diinginkan pemerintah daerah dibandingkan dengan potensi PAD yang dimiliki. Menurut Abdul (2001:321) keberadaan pemerintah tidak dapat diabaikan dalam kaitannya dengan upaya peningkatan PAD, sebab pemerintah inilah yang dapat melaksanakan operasional kegiatan untuk meningkatkan PAD itu sendiri. Disini sistem manajemen pemerintahan khususnya yang menangani tentang keuangan daerah sangat penting dalam melaksanakan dan menopang penggalan sumber-sumber keuangan maupun pemamfaatannya.

Sebagai organisasi pengelolaan PAD, pemerintah tidak terlepas dari pelaksanaan administrasi yaitu segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama untuk mencapai tujuan yang disokong dengan motivasi yang dimiliki disertai dengan pengawasan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai bersama.

Abdul (2001:322) mengatakan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PAD yang dilihat dari sisi pengadministrasian yaitu

1. Pelengkapan Pendapatan.
2. Perbaikan organisasi.
3. Penyempurnaan administrasi.
4. Penyesuaian tarif.
5. Koordinasi pemungutan.
6. Pencegahan kebocoran.

Perencanaan target pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah harus lebih realistis sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakatnya. Besarnya pajak dan retribusi harus mampu menggambarkan nilai-nilai atau potensi yang ada, pada suatu daerah tertentu agar tercermin peningkatan pendapatan asli daerah.

Di sinilah daerah dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak tergantung subsidi dari pusat, dimana daerah dituntut untuk dapat menggali potensi-potensi yang ada di daerahnya. Menurut Abdul (2001) hal yang bisa dilakukan dalam meningkatkan PAD terutama terhadap pajak dan retribusi daerah yaitu

1. Penyederhanaan sistem dan prosedur pajak dan retribusi daerah dengan memberikan pelayanan prima artinya petugas pajak bersikap ramah kepada masyarakatnya dalam memberikan layanan.
2. Peningkatan pengawasan terhadap penerimaan pajak baik terhadap wajib pajak maupun petugas pajak.
3. Membenahi peraturan-peraturan daerah terkait dengan berbagai jenis pungutan pajak maupun retribusi.

Oleh Karena itu daerah harus mempunyai inisiatif sendiri untuk meningkatkan pendapatannya yang tentu saja tidak bertentangan dengan Undang–Undang yang berlaku.

b. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang

dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Abdul (2001) mendefenisikan PAD sebagai penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 menyimpulkan Pendapatan Asli Daerah adalah suatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang asli. Ahmad (2002:51) mendefenisikan pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan.

Jadi dapat disimpulkan pendapatan asli daerah adalah penghasilan yang diperoleh melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kas daerah yang benar-benar berasal dari daerah itu sendiri. PAD merupakan sumber keuangan daerah yang harus selalu dan terus menerus dipacu pertumbuhannya.

c. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Ahmad (2002:51) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber PAD terdiri dari:

1. Hasil pajak daerah.
2. Hasil retribusi daerah.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
4. Lain-lain PAD yang sah.

Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dengan UU No. 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 18 Tahun 1997 dan ditindak lanjuti peraturan pelaksanaannya, yaitu PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

1. Pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa balik, sebagaimana alat pencegah dan pendorong untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan.

Menurut Mariot dalam Fitri (2009) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian pajak

daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda).

Berikut sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000

1. Pajak hotel dan restoran.

Pajak hotel dan restoran adalah pajak atas pelayanan hotel dan restoran. Subyek pajak hotel dan restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atau pelayanan hotel dan atau restoran. Dasar pajak hotel dan restoran adalah jumlah pembayaran tamu kepada hotel dan restoran.

2. Pajak hiburan.

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang ditandai oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

3. Pajak Reklame.

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang dipergunakan untuk memperkenalkan suatu barang atau jasa agar menarik perhatian umum.

4. Pajak penerangan jalan.

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

5. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.

Pajak ini merupakan pajak atas kegiatan eksplorasi bahan galian golongan C.

2. Retribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah.

Disamping pajak daerah, sumber PAD yang cukup besar peranannya dalam menyumbang agar terbentuknya PAD adalah retribusi daerah. Dalam UU No. 34 tahun 2000 dalam pasal 1 dinyatakan retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 terdiri dari:

a) Objek retribusi terdiri dari

- 1) Jasa umum
- 2) Jasa usaha
- 3) Perizinan tertentu

b) Retribusi dibagi atas tiga golongan

- 1) Retribusi jasa umum

Adapun yang termasuk dalam jasa pelayanan umum antara lain: pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan dan persampahan,

penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk (KTP) dan akta catatan sipil, pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, pelayanan parkir ditepi jalan umum, pelayanan pasar, pelayanan air bersih, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

2) Retribusi jasa usaha

Secara rinci jasa-jasa usaha dapat disebut sebagai berikut:

Pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan atau pertokoan, pelayanan terminal, pelayanan tempat khusus parkir, pelayanan tempat penitipan anak, penyedotan kakus, rumah potong hewan, tempat pendaratan kapal, tempat rekreasi dan olahraga, penyeberangan diatas air, penjualan usaha produksi daerah.

3) Retribusi perizinan tertentu

Perizinan tertentu yang dapat dipungut retribusinya antara lain untuk: izin peruntukan penggunaan tanah, izin mendirikan bangunan (IMB), izin tempat penjualan minuman berakohol, izin gangguan, izin trayek, izin pengambilan hasil hutan.

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.

Adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD seperti

bagian laba perusahaan daerah air minum (PDAM), bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya.

4. Lain-lain PAD yang sah.

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2. Motivasi Pemerintah

a. Pengertian Motivasi Pemerintah

Motivasi banyak dibicarakan orang dalam berbagai aspek, meskipun mempunyai pengertian dasar yang sama, tetapi memiliki definisi yang bervariasi, tergantung pada aspek kehidupan apa motivasi ini akan diaplikasikan.

Manusia dalam suatu organisasi atau pemerintahan mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena manusia bisa mengetahui masukan yang perlu diambil dari lingkungan, cara mendapatkan dan menangkap masukan tersebut menggunakan teknologi, mampu mengolah atau mentransformasikan masukan-masukan tersebut menjadi suatu keluaran atau hasil yang berarti. Manusia menjadi penggerak dan penentu jalannya pemerintahan, maka perhatian dari pimpinan sangat diperlukan.

Istilah motivasi berasal dari perkataan latin, ada berbagai rumusan untuk istilah motivasi seperti yang diungkapkan oleh Mitchell dalam Winardi

(2001:1) mengatakan bahwa motivasi mewakili proses psikologika yang menyebabkan timbulnya, diarahkannya dan terjadinya persistensi kegiatan-kegiatan sukarela yang diarahkan kearah tujuan tertentu. Maksudnya seorang pimpinan perlu memahami proses-proses psikologika bila berkeinginan untuk membina agar pekerjaan yang dilakukan berhasil dalam upaya pencapaian sasaran keorganisasian.

Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1998) mendefenisikan motivasi sebagai berikut:

“Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang, sadar atau tidak sadar melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, atau motivasi adalah usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelakuan orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya”

Lain halnya yang dikemukakan oleh Gray dalam Winardi (2001) mengungkapkan bahwa motivasi merupakan hasil sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi seorang individu yang menyebabkan timbulnya sikap entusiasme dan persistensi dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu.

Motivasi seringkali diartikan sebagai dorongan atau tenaga yang merupakan gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat. Sehingga motivasi merupakan suatu tenaga jiwa dan jasmani untuk berbuat. Tanpa adanya motivasi dalam diri seseorang, maka dapat dipastikan bahwa orang itu tidak akan bergerak sedikitpun dari tempatnya berada. Begitupun dalam kehidupan berorganisasi, motivasi pemerintah sangat mutlak adanya. Sehebat apapun rencana yang telah dibuat oleh pemerintah, apabila dalam proses aplikasinya

dilakukan oleh anggota yang kurang atau bahkan tidak memiliki motivasi yang kuat, maka akan menyebabkan tidak terealisasinya rencana tersebut.

Seseorang yang termotivasi yaitu orang yang melaksanakan upaya substansial guna menunjang tujuan-tujuan kesatuan kerja dari organisasi tempat bekerja. Menurut Winardi (2001:2) seseorang yang tidak termotivasi hanya memberikan upaya minimum dalam hal bekerja, konsep motivasi ini merupakan sebuah konsep penting dalam tatanan kerja seseorang. Dari defenisi diatas dapat dilihat bahwa:

1. Motivasi dimulai dari adanya energi atau tenaga dalam diri pribadi seseorang.
2. Motivasi ditandai dengan timbulnya perasaan yang mengarah tingkah laku seseorang.
3. Motivasi ditandai oleh reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Pemerintah

Motivasi merupakan sebuah konsep eksplanatoris yang dimanfaatkan untuk memahami perilaku-perilaku yang diamati. Dimana motivasi merupakan suatu kekuatan potensial yang ada didalam diri seseorang, yang dapat dikembangkannya sendiri atau dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar yang pada intinya berkisar sekitar imbalan-imbalan yang dapat mempengaruhi hasil kinerjanya secara positif atau negatif, tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi orang yang bersangkutan (Winardi 2001:5).

Menurut Rivai (2005:478) Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja seseorang pada dasarnya secara praktis dapat dibedakan atas dua kelompok yaitu

1. Faktor Intrinsik

Dimana faktor intrinsik adalah faktor yang berasal dari dalam diri karyawan dan dibawa oleh setiap karyawan sejak mulai bekerja ditempat kerjanya. Setiap individu bertindak karena adanya sejumlah kekuatan yang mendorong yang ada dalam diri mereka sendiri seperti,

a. Keinginan-keinginan

Ada orang yang menginginkan banyak kekuasaan, ada juga ingin mengekspresikan diri dalam setiap pekerjaan yang dilakukan agar tujuan yang ingin dicapai baik disadari ataupun tidak disadari menyebabkan orang yang bersangkutan bertindak atau melakukan suatu tindakan.

b. Kebutuhan-kebutuhan

Kebutuhan mempengaruhi seorang individu secara langsung karena mempengaruhi pikiran-pikiran serta tindakan-tindakan. Pengimplementasian memerlukan pemahaman secara mendalam tentang proses-proses motivasional, mengaitkan kebutuhan-kebutuhan individual dengan sasaran keorganisasian pengetahuan tentang kebutuhan-kebutuhan yang terlibat didalamnya.

2. Faktor Ekstrinsik

Faktor ekstrinsik menyangkut hal-hal yang berasal dari luar diri seseorang seperti penghargaan, interaksi dengan karyawan lain dan kondisi fisik lingkungan kerja. Seseorang yang akan melakukan kegiatan akan menilai kemampuannya baik pengetahuan atau keterampilan untuk memperkenalkan apakah mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik atau tidak agar memperoleh imbalan yang diinginkan. Bagaimana dukungan dari atasannya agar bisa berhasil dan sejauhmana kerja sama dengan rekan-rekan akan membantu keberhasilan, atau sejauhmana bisa memperoleh perlengkapan yang menjalankan pekerjaan apabila nilai mamfaat yang akan diperoleh dan probabilitas keberhasilan pekerjaan tampak positif.

Kebanyakan orang senang menerima pengakuan terhadap pekerjaan yang diselesaikan dengan baik. Bediam diri saja tidak cukup terutama apabila pekerjaan baik, dihargai tanpa komentar. Sementara pekerjaan jelek selalu diberikan teguran. Pimpinan tentu saja tidak bisa memberikan pujian untuk siapa saja dan pekerjaan apa saja. Bagaimanapun setiap pekerjaan yang terselesaikan dengan baik akan menyenangkan perasaan pimpinan.

Secara teoristis menurut Rivai (2005) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi terdiri dari gaya kepemimpinan, produktivitas kerja, perilaku, efektifitas kerja dan tanggung jawab.

Winardi (2001) berpendapat bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi seseorang dalam bekerja menyangkut pada:

1. Budaya

Budaya organisasi atau pemerintah pada dasarnya mewakili norma-norma perilaku yang diikuti oleh para anggota organisasi, termasuk anggota organisasi yang berada dalam hirarki organisasi. Norma tersebut dapat terlihat dari kebiasaan-kebiasaan rutinitas yang diterapkan dari organisasi.

Budaya organisasi mampu menjadi faktor kunci keberhasilan organisasi tetapi dapat pula menjadi faktor utama kegagalan organisasi. Budaya ini berbeda-beda tiap organisasi, ada organisasi yang memiliki budaya yang kuat dan ada pula yang memiliki budaya organisasi yang lemah. Oleh karena itu setiap organisasi haruslah memiliki budaya yang dapat menjadikan ciri dari organisasi agar setiap tujuan yang dicapai adalah sama.

Budaya organisasi banyak berpengaruh pada pola perilaku seseorang terutama terdapat dalam bidang:

1. Nilai-nilai perusahaan (masalah baik-buruk, masalah etika).
2. Suasana organisasi (bagaimana orang merasa dan beraksi).
3. Gaya kepemimpinan dalam melakukan wewenang.

2. Kepemimpinan

Jika dilihat pada konteks kepemimpinan hal yang saling terkait adalah adanya unsur kader penggerak, adanya peserta yang digerakkan,

adanya komunikasi, adanya tujuan organisasi dan adanya manfaat yang tidak hanya dinikmati oleh sebagian anggota. Pada dasarnya setiap tindakan yang diambil oleh pimpinan atau manajer mempengaruhi iklim dalam beberapa hal, seperti aturan-aturan, kebijakan-kebijakan, dan prosedur-prosedur organisasi terutama masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah personalia, distribusi imbalan, gaya komunikasi, cara-cara yang digunakan untuk memotivasi, teknik-teknik dan tindakan pendisiplinan, interaksi antara manajemen dan kelompok, dan interaksi antar kelompok.

c. Teori-teori Motivasi

Teori motivasi pada dasarnya dibedakan menjadi dua yaitu teori kepuasan dan teori proses. Teori kepuasan tentang motivasi berkaitan dengan faktor yang ada dalam diri seseorang yang memotivasinya. Sedangkan teori proses berkaitan dengan bagaimana motivasi itu terjadi atau bagaimana perilaku itu digerakkan.

Menurut Inriyo (2005) teori motivasi pada dasarnya dibedakan menjadi dua:

1. Teori kepuasan

Berisi tentang motivasi berkaitan dengan factor-faktor yang membangkitkan atau memulai perilaku atau factor yang ada dalam diri seseorang yang memotivasinya.

2. Teori proses

Teori yang berisikan tentang bagaimana motivasi itu terjadi atau bagaimana perilaku itu digerakkan, diarahkan, didukung atau dihentikan.

Pada pemerintahan motivasi menjadi tanggung jawab untuk menciptakan, melaksanakan atau memantau, motivasi itu pun bila tidak ada yang membuat perubahan baru maka akan membosankan atau membuat jenuh sehingga fungsinya akan berkurang.

3. Pengawasan Pemerintah

a. Pengertian Pengawasan Pemerintah

Secara umum yang dimaksud dengan pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan menurut keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pasal 1 (6) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pendapat tersebut melihat arti pengawasan pemerintah yang dilihat proses kegiatan pemerintah daerah agar berjalan sesuai rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Manulang dalam Bohari (1995) memandang bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Pengawasan berupa tindakan atau kegiatan usaha untuk mengawasi dan mengendalikan pekerjaan bawahan secara langsung yang harus dilakukan sendiri oleh setiap pimpinan. Adapun pengawasan ini dimaknai sebagai serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya.

Juhir (1994:71) mengatakan bahwa pengawasan adalah pengawasan yang otomatis timbul pada saat melakukan tindakan dalam melaksanakan tanggung jawab pimpinan didalam pemerintahan.

Bertolak dari pandangan tentang pengertian pengawasan tersebut maka jelaslah bahwa pengawasan tersebut merupakan suatu upaya agar apa yang telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan dan kesulitan dalam pelaksanaan, sehingga berdasarkan pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya, demi tercapainya wujud keinginan semula.

b. Tujuan Pengawasan Pemerintah

Dapat dilihat betapa kelirunya bila ada yang menganggap bahwa kegiatan pengawasan sebagai kegiatan yang semata-mata bertujuan mencari kesalahan. Salah satu aspek pengawasan, sebagaimana telah disinggung diatas, adalah pelaksanaan pemeriksaan. Tujuan pelaksanaan pemeriksaan ini adalah untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan yang sesungguhnya telah sesuai dengan yang seharusnya. Dengan demikian penekanannya lebih pada upaya untuk mengenali penyimpangan atau hambatan didalam pelaksanaan kegiatan itu.

Tujuan pengawasan pada dasarnya adalah mengamati apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Bila ternyata kemudian ditemukannya ada penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan atau hambatan itu diharapkan dapat segera dikenali, agar dapat pula segera diambil tindakan koreksi.

Juhir (1994:26) mengungkapkan bahwa tujuan pengawasan yaitu untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Secara konkrit pengawasan pada hakekatnya tercakup dalam penyempurnaan administrasi dan manajemen pemerintahan.

Menurut Juhir (1994) tujuan dari pengawasan adalah

1. Agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat yang obyektif.

2. Agar terselenggaranya tertip administrasi dilingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat harus adanya kelugasan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan.

Selanjutnya pengawasan itu secara langsung juga bertujuan untuk,

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah.
2. Menertipkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

Dengan demikian pengawasan sangat erat kaitannya dengan rencana dari suatu pemerintahan maka dapat disimpulkan tujuan pengawasan adalah untuk mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi, dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan kepada pimpinan yang bersangkutan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu.

c. Prinsip Pengawasan

Dalam pemerintahan untuk menjamin agar semua kegiatan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan yang dibarengi dengan tindakan penertiban. Pengawasan mempunyai arti luas yang bersifat menyeluruh yang didalamnya tercakup kegiatan pengendalian,

pemeriksaan dan penilaian terhadap semua kegiatan dalam organisasi pemerintahan.

Pengawasan tersebut mempunyai sifat menyeluruh dan luas dimana perlu adanya prinsip-prinsip pengawasan. Menurut Juhir (1994:75) prinsip pengawasan pada umumnya adalah

1. Obyektif dan menghasilkan fakta.

Pengawasan harus bersifat obyektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

2. Berpangkal tolak dari keputusan pimpinan.

Untuk dapat mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan. Pengawasan harus bertolak pangkal dari keputusan pimpinan.

3. Preventif.

Karena pengawasan pada dasarnya adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, yang harus efisien dan efektif, maka pengawasan harus bersifat mencegah jangan sampai terjadi kesalahan yang berkembang dan terulang.

4. Bukan tujuan tetapi sarana.

Pengawasan hendaknya tidak dijadikan tujuan tetapi sarana untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi.

5. Efisiensi.

Pengawasan haruslah dilakukan secara efisiensi bukan justru menghambat efisien pelaksanaan pekerjaan.

d. Jenis Pengawasan

Dalam suatu sistem pemerintahan pengawasan sangat perlu baik secara vertikal, horizontal, eksternal, internal, preventif maupun represif agar maksud dan tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Juhir (1994:27) mengatakan bahwa pengawasan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Pengawasan langsung dan tidak langsung.

a. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti memeriksa dan mengecek laporan-laporan secara langsung dari pelaksanaan.

b. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksanaan baik lisan maupun tulisan.

2. Pengawasan preventif dan represif.

a. Pengawasan preventif

Pengawasan preventif dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai.

b. Pengawasan represif

Adapun pengawasan represif dilakukan memulai dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat, meminta laporan pelaksanaan.

3. Pengawasan intern dan pengawasan ekstern

a. Pengawasan intern

Pengawasan yang dilakukan oleh yang berwenang dalam pemerintahan atau organisasi, dimana pada dasarnya pengawasan ini dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri.

b. Pengawasan ekstern

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparat dari luar organisasi sendiri, seperti halnya dilaksanakan oleh BPK.

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, antara lain penelitian Rizka (2007) mengenai pengawasan terhadap pendapatan asli daerah: penelitian dilakukan di Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baiknya control internal berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan daerah, hal ini menunjukkan bahwa semakin baiknya control internal pada pemerintah maka semakin rendahnya penyelewengan terhadap penerimaan PAD sehingga penerimaan PAD mengalami peningkatan.

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Dimas (2009) tentang kemampuan pegawai dan motivasi pegawai dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah: studi di Kabupaten Cilacap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi pegawai berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan penerimaan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya motivasi pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan maka tujuan pencapaian PAD akan terlaksana sesuai rencana, sedangkan kemampuan pegawai dalam bekerja memberikan pengaruh yang signifikan positif juga terhadap penerimaan daerah.

Dari penelitian-penelitian yang sudah ada, peneliti tertarik untuk melihat seberapa besar motivasi pemerintah daerah kota padang serta pengawasan pemerintah terhadap upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.

C. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Motivasi Pemerintah Terhadap Upaya Meningkatkan PAD

Seseorang yang memiliki motivasi merupakan orang yang dapat melaksanakan upaya substansial guna menunjang tujuan-tujuan yang direncanakan kesatuan kerja dari organisasi tempat bekerja. Menurut Winardi (2001:2) seseorang yang memiliki motivasi akan memberikan upaya yang maksimal dalam setiap pekerjaan yang dilakukan, dalam hal melaksanakan tugas guna menerangkan kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri atas upaya yang dilaksanakan untuk pencapaian hasil yang mengarah pada bentuk kerja yang bagus dalam pengoptimalan setiap pencapaian tujuan.

Tujuan yang dimaksud merupakan suatu yang menyangkut pada pola kerja yang termotivasi terhadap penerimaan yang dilihat dari segi pemungutan dan pengadministrasian oleh pemerintah terhadap pajak dan retribusi daerah kepada masyarakatnya.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Dimas (2009) tentang kemampuan pegawai dan motivasi pegawai dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi pegawai berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan penerimaan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan maka tujuan pencapaian penerimaan daerah akan terlaksana.

Dalam meningkatkan penerimaan daerah terkait pada motivasi yang merupakan suatu tenaga jiwa dan jasmani untuk berbuat sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Tanpa adanya motivasi maka dapat dipastikan bahwa orang tidak tergerak akan bekerja. Begitu pula dalam kehidupan berorganisasi, sebagus apapun tujuan yang telah direncanakan oleh pemerintah apabila dalam proses aplikasinya dilakukan oleh anggota yang tidak memiliki motivasi yang kuat dalam bekerja maka akan menyebabkan tidak terealisasinya tujuan yang ingin dicapai atas penerimaan daerah, oleh karena itu peran dari motivasi sangat menunjang terhadap tujuan yang ingin dicapai dari instansi terkait. Dimana tujuan atas pengoptimalan penerimaan daerah yang diperoleh dari tatanan pengadministrasiannya.

2. Hubungan Pengawasan Pemerintah Terhadap Upaya Meningkatkan PAD

Abdul (2001:150) mengatakan pengawasan terhadap penerimaan daerah lebih ditekankan terutama pada pengumpulan penerimaan. Tujuannya adalah agar kegiatan pengawasan tidak menghambat masuknya penerimaan-penerimaan daerah. Penerimaan yang tidak mengalami hambatan-hambatan secara langsung dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dimana penerimaan Pemerintah Kota Padang kurang mendapat pengawasan yang berarti dari instansi terkait sehingga penerimaan daerah terlihat belum optimal dari segi pengadministrasiannya.

Berdasarkan penelitian Rizka (2007) menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh signifikan positif terhadap upaya meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengawasan pemerintah terhadap penerimaan-penerimaan daerah maka upaya untuk meningkatkan PAD dapat terealisasi.

Dalam meningkatkan penerimaan daerah dibarengi dengan pengawasan atas penerimaan-penerimaan. Hal ini dikarenakan pengawasan pemerintah merupakan suatu hal untuk menilai dan mengetahui kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak. Dimana pengawasan dilakukan pada penerimaan daerah yang dilihat dari sisi pengadministrasian, yang dilakukan oleh pemerintah terkait untuk memahami apa yang salah demi perbaikan dimasa datang, dan

mengarah pada seluruh kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal.

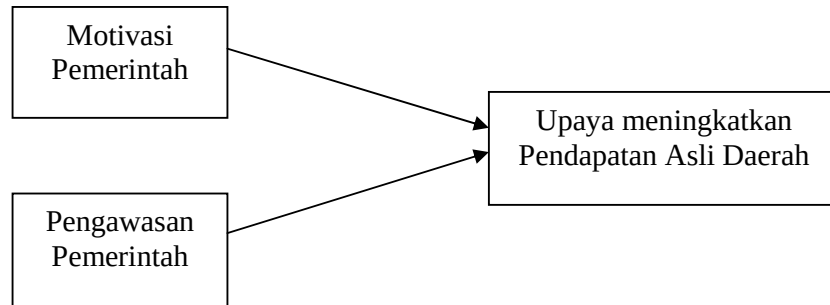
D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan dan mengungkapkan keterkaitan antar variabel yang akan diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dikemukakan diatas, dapat dijelaskan bahwa untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang ada dibutuhkan pengawasan pemerintah serta motivasi dari dalam diri untuk bekerja dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Motivasi yang berasal dari dalam diri merupakan titik tolak utama dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang ada, karena dengan adanya motivasi dari pemerintah untuk memotivasi peningkatan dan memperbaiki kinerja maka berpengaruh baik terhadap Pendapatan Asli Daerah itu sendiri.

Selain dari pada faktor pengawasan juga berperan penting dalam ini karena pengawasan itu sendiri bukan untuk membuntuti pekerjaan seseorang tetapi untuk melihat seberapa jauh kegiatan kerja agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dapat dilakukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Motivasi Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang.

H₂ : Pengawasan Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari Pengaruh Motivasi Pemerintah dan Pengawasan Pemerintah Terhadap Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada instansi pemerintah Kota Padang adalah sebagai berikut :

1. Motivasi Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap upaya meningkatkan pendapatan asli daerah pada instansi pemerintah daerah di Kota Padang.
2. Pengawasan Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap upaya meningkatkan pendapatan asli daerah pada instansi pemerintah daerah di Kota Padang.

B. Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Responden penelitian terbatas kepala SKPD serta Staf Bagian Keuangan saja. Sehingga penelitian ini kemungkinan akan menunjukkan hasil yang berbeda jika Responden di tambah pada Kepala Bidang di masing-masing SKPD tersebut.
2. Kuesioner yang peneliti sebarakan masih terdapat keterbatasan, karena pernyataan dalam kuesioner peneliti hanya menggunakan pernyataan positif saja. Sehingga

ini menyebabkan responden di arahkan untuk pilihan jawaban yang baik atau positif saja.

3. Penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Sebaiknya dalam mengumpulkan data dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis agar data yang diperoleh akan lebih akurat lagi.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh berbagai pihak:

1. Melihat adanya pengaruh positif antara Motivasi Pemerintah dengan Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sebaiknya hal ini dapat dipertahankan secara berkelanjutan agar tujuan terhadap pencapaian upaya meningkatkan pendapatan asli daerah pada tahun berikutnya dapat lebih ditingkatkan serta dipertahankan.
2. Melihat adanya pengaruh positif antara Pengawasan Pemerintah dengan Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka sebaiknya pengawasan pemerintah dapat dipertahankan untuk kedepannya agar tujuan pencapaian upaya meningkatkan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan dapat lebih ditingkatkan dan dipertahankan untuk tahun-tahun berikutnya.
3. Bagi instansi Pemerintah Daerah disarankan untuk lebih meningkatkan motivasi dalam bekerja serta pengawasan yang lebih bermamfaat dalam penyelenggaraan

dan pengelolaan penerimaan daerah agar pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan serta dapat terwujud sepenuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2001. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Ahmad, Yani. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Garfindo Persada
- Arif, Fajri. 2004. *Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran*. Skripsi. Padang. FE UNP
- Bohari.1995. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dimas, Estu. 2009. *Hubungan Kemampuan Pegawai dan motivasi Pegawai Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Melalui www.google.com diakses [15 November 2010]
- Fitri, Yani. 2009. Analisis Pertumbuhan (Growth) PAD dan Kotribusi (Share) PAD Terhadap Belanja Daerah Sebelum dan sesudah otonomi Daerah. Skripsi. Padang . FE UNP
- Ghozali, Iman. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Husein, Umar. 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Inriyo, Gitosudarno. 2005. *Perilaku keorganisasian*. Edisi I. Yogyakarta: Salemba Empat
- Juhir, Jusuf. 1994. *Aspek hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan*. Jakarta: Rineka cipta
- Rivai, Veithzal. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: Murai Kencana.
- Rizka, Amrita. 2007. *Upaya Meningkatkan Pengawasan Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Melalui www.google.com diakses tanggal [7 November 2010]
- Santoso, Singgih. 2000. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat